



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

IMPLEMENTASI PROGRAM KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Hera Viqulu Hani

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jalan Gatot Sibroto KM 7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan
Email: herahani02@gmail.com

ABSTRACT

This suggested aims to determine the implementation of the cleanliness program at the Kuantan Singingi Regency Environmental Service. The problem found is that there are still programs being implemented but the implementation and implementation of these programs are not yet smooth. As there are still many people who throw rubbish carelessly, even though rubbish dump sites have been provided. This research method is descriptive research with a qualitative approach. Qualitative descriptive research is research that aims to describe and describe events and phenomena that occur in the field and present data systematically, factually and accurately regarding facts or phenomena that occur in the field. Information consists of 8 people. Data collection was carried out using observation, interviews and documentation techniques. The research uses source triangulation to check the validity of the research data. Data analysis in this research uses four components consisting of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the study conducted through observation, interviews, and documentation, it can be concluded that the implementation of the cleanliness program at the Kuantan Singingi Regency Environmental Service has been implemented sufficiently. Although various facilities and programs have been provided, such as waste disposal sites and socialization to the community, in reality there are still many people who litter. This shows that the level of public awareness of the importance of environmental cleanliness is still low.

Keywords: *Implementation, Cleanliness Program*

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan yang ditemukan adalah masih terdapat program yang dilaksanakan tetapi belum lancar dalam pelaksanaan dan menjalankan program-program tersebut. Seperti masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, padahal sudah disediakan tempat pembuangan sampah. Metode penelitian ini adalah penelitian



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan memyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Informasi terdiri dari 9 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan empat komponen yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dari penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi program kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup terimplementasi. Meskipun berbagai fasilitas dan program telah disediakan, seperti tempat pembuangan sampah dan sosialisasi kepada masyarakat, kenyataannya masih banyak ditemukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan masih rendah.

Kata kunci : Implementasi, Program Kebersihan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan sampah tidak lepas dari adanya aktivitas manusia diberbagai sektor. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Masyarakat masih beranggapan bahwa sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, sehingga banyak yang membuang sampah tanpa dikelola dengan baik yang mengakibatkan timbulnya pencemaran. Sampai saat ini permasalahan sampah belum ditangani dengan baik.

Semakin bertambahnya penduduk indonesia yang diiringi dengan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume sampah dan jenis sampah yang beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan atau yang sulit diurai oleh proses alam. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan bau yang tidak sedap, mengurangi tingkat kesuburan tanah dan menghambat sirkulasi tanah, serta menghambat aliran air.

Pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pengelolaan sampah yang kurang baik, berdampak buruk pula bagi kesehatan, sehingga peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga pemerintahan sangat penting dalam mengelola sampah agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Selain peran Dinas Lingkungan Hidup, peran masyarakat juga diperlukan dalam mengurangi dan mengelola sampah. Perlu diingat bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan dan menunjang hidup rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup. Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan berkelanjutan,



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam yang sesuai dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.

Salah satu faktor penghambat dalam penanganan sampah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih dan mengelola sampah. Banyak pula masyarakat yang enggan membuangnya ke tempat sampah, tetapi justru membuangnya ke sungai atau di pinggir jalan. Hal ini tentu saja berpengaruh pada baku mutu air, karena air sungai menjadi sumber Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam distribusi air bersih di Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, kebiasaan membuang sampah ke drainase menyebabkan tersumbatnya aliran air sehingga apabila hujan akan terjadi banjir, maka diperlukan penataan ulang drainase dan menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan.

Permasalahan lingkungan hidup di kabupaten kuantan singingi semakin lama semakin kompleks dan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Permasalahan lingkungan hidup tersebut antara lain kebakaran hutan dan lahan, potensi bencana alam seperti banjir, penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas udara, timbunan sampah dan limbah B3, permasalahan lain yang bersifat global, adalah perubahan iklim (*climate change*), efek rumah kaca (*green house effect*) dan penipisan ozon (*ozone depletion*).

Berbagai permasalahan lingkungan hidup diatas telah menurunkan kualitas lingkungan hidup dan mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup padahal lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan hak asasi setiap anggota masyarakat di kabupaten kuantan singingi.

Dalam rangka mengatasi hal-hal tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi perlu menyusun rencana strategi yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama sama antara pimpinan untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran sesuai tugas pokok, fungsi kewenangan secara efektif, efisien, dan produktif.

Berdasarkan pengamatan peneliti ditemukan beberapa permasalahan mengenai pelaksanaan program kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kuantan Singingi masih terdapat program yang dilaksanakan tetapi belum lancar dalam pelaksanaan dan menjalankan program-program tersebut. Seperti masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, padahal sudah disediakan tempat pembuangan sampah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya banjir. Misalkan saat musim hujan seperti sekarang ini, selokan tidak bisa lagi menampung air karena tersumbat oleh sampah dan mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa lokasi. Terutama di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang sekaligus juga melatar belakangi penulisan untuk menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Program Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi”**.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah **“Implementasi Program Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus Kota Teluk Kuantan)”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelien ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Program Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum lingkungan pada khususnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi:

1.4.2.1 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai bahan masukan untuk membuat suatu Peraturan Daerah guna meningkatkan pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

1.4.2.2 Dinas Lingkungan Hidup, sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan penanganan dan pengelolaan kenersihan khususnya dalam hal sampah.

a. Masyarakat, sebagai bahan informasi untuk memperluas wawasan mengenai hukum lingkungan, sehingga diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar dan berperan aktif dalam menjaga dan mengelola lingkungan.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Ilmu administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari tentang proses dinamika kerjasama manusia. Kerja sama merupakan gejala yang sifatnya universal dan sudah ada dan berlangsung sejak jaman primitif sampai jaman modern. Administrasi dalam arti luas merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerangka kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi merupakan sesuatu yang bersifat universal jadi ia ada dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri, hal itu disebabkan karena administrasi dapat dijumpai pada setiap aspek kehidupan (ekonomi, sosial, politik dsb). Karena begitu luasnya bidang administrasi sampaisampai ‘Robert Prethus’ mengatakan bahwa tidak ada ilmu sosial yang lebih luas cakupanya dibandingkan dengan ilmu administrasi.

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi dan Prilaku Organisasi

Dalam buku Malayu S.P. Hasibuan, (2014: 24-25), terdapat kutipan pengertian organisasi sebagai berikut. Louis A. Allen: “Organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokkan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan”. James D. Mooney: “Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia, untuk mencapai tujuan bersama”. Dalam perilaku organisasi juga merupakan suatu cara berpikir, suatu cara untuk memahami persoalan-persoalan dan menjelaskan secara nyata hasilhasil penemuan berikut tindakan-tindakan pemecahan masalah. Perilaku organisasi dapat pula dirumuskan sebagai suatu sistem studi dari sifat organisasi seperti misalnya bagaimana organisasi dimulai, tumbuh dan berkembang serta bagaimana pengaruhnya terhadap anggota-anggota sebagai individu, kelompok pemilih, organisasi lainnya, dan institusi-institusi lainnya yang lebih besar. Mempelajari perilaku organisasi sifatnya agak abstrak. Mempelajari perilaku organisasi sering kali menghasilkan atau menemui prinsip-prinsip yang kompleks dimana penjelasan atau analisisnya bersifat situasional.

2.1.3 Teori/Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

2.1.4 Teori/Konsep Masyarakat Kota dan Penataan Kota

Masyarakat menurut kamus bahasa Indonesia adalah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan yang berbudaya. Sedangkan masyarakat kota adalah masyarakat yang tinggal didaerah dekat dengan pusat pemerintahan. Masyarakat kota terdiri dari beragam suku dan kebanyakan biasanya pendatang.

Penataan kota atau tata ruang kota adalah strategi perencanaan untuk mengatur penggunaan ruang di dalam kota. Penataan kota dilakukan untuk menciptakan kota yang teratur, tertib, dan tidak menimbulkan masalah sosial di masyarakat.

Penataan kota mencakup kebutuhan perekonomian, sosial, dan kebudayaan. Penataan kota juga memperhatikan kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana. Perencanaan kota berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, baik dalam bidang social, ekonomi, hingga lingkungan hidup.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

2.1.5 Teori/Konsep Lingkungan Hidup

Secara realistis lingkungan merupakan suatu cabang yang baru dalam cabang ilmu pengetahuan, namun demikian dalam perkembangannya merupakan salah satu cabang ilmu yang memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini disebabkan karena pendekatan yang dipakai oleh ilmu lingkungan adalah pendekatan yang bersifat menyeluruh. Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebabnya lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan yang sangat menentukan.

2.1.6 Teori/Konsep Otonomi Daerah

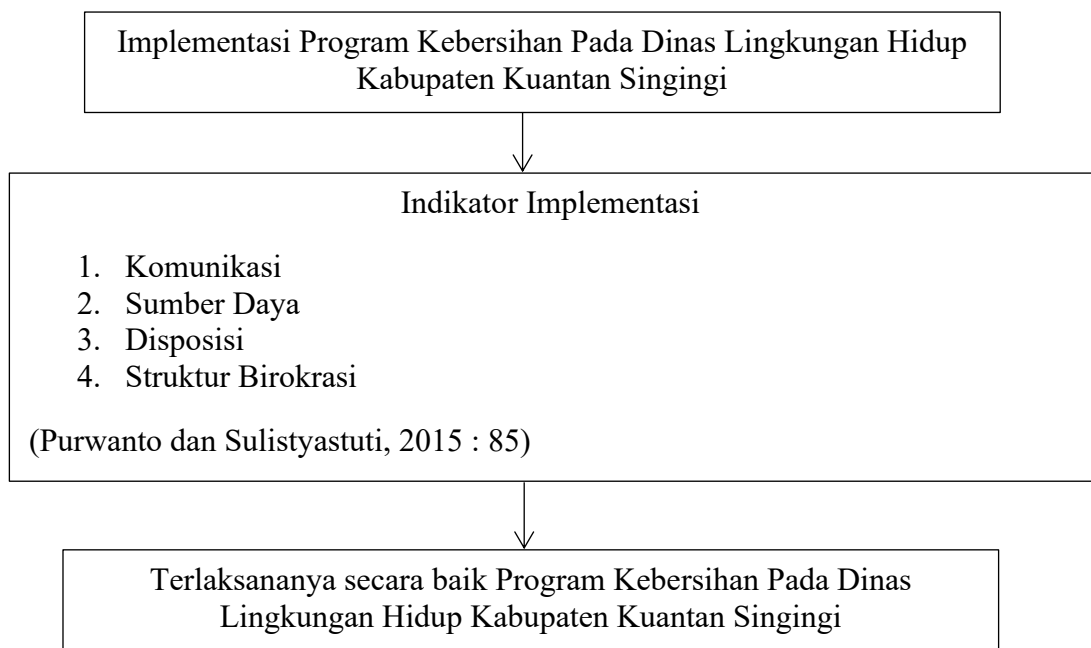
Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Jadi ada 2 ciri hakikat dari otonomi yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws*.

Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran





Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Sumber : Modifikasi peneliti 2025

2.3 Hipotesis Kerja

Hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah diduga implementasi Program Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus Kecamatan Kuantan Tengah) kurang terimplementasi.

2.4 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisis penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini.

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Implementasi Program Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, dengan indikator :

1. Kominikasi, diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III perlu disampaikan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
2. Sumber Daya, Edward III mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.
3. Disposisi, Pengertian disposisi menurut Edwrd III dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implentors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
4. Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya perosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak ileksibel.

2.5 Operasional Variabel

Operasional Variabel adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada peneliti tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Defenisi variabel merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti mengetahui penjelasan variabel yang dipilih oleh peneliti.



Tabel 2.1 : Operasional Variabel Penelitian Implementasi Program Kebersihan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Variabel	Indikator	Item Penelitian
Teori Implementasi Menurut Edwar III (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2015 : 85)	1. Komunikasi	Terimplementasi
		Cukup Terimplementasi
		Kurang Terimplementasi
		Tidak Terimplementasi
	2. Sumber Daya	Terimplementasi
		Cukup Terimplementasi
		Kurang Terimplementasi
		Tidak Terimplementasi
	3. Disposisi	Terimplementasi
		Cukup Terimplementasi
		Kurang Terimplementasi
		Tidak Terimplementasi
	4. Struktur Birokrasi	Terimplementasi



Variabel	Indikator	Item Penelitian
		Cukup Terimplementasi
		Kurang Terimplementasi
		Tidak Terimplementasi

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2025

3.1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah survei, dengan tingkat eksplanasi deskriptis dan analisis data kualitatif.

Survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel. (Sugiyono, 2016 : 7)

Kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. (Sugiyono, 2016 : 15)

3.2 Informan

Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun informan penelitian tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian tentang Implementasi Program Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi

No	Unsur Informasi	Jumlah Informasi	Persentase (%)
1	Kepala Dinas	1	11%
2	Kepada Bidang Tata Lingkungan	1	11%
3	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	1	11%
4	Kasi Pengawasan Lingkungan Hidup	1	11%
5	Kasi Pengendalian Dampak Lingkungan	1	11%
6	Kasi Pengawasan Lingkungan Hidup	1	11%



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

7	Petugas Kebersihan	3	33%
Jumlah		9	100%

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2025

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari pengumpulan data. Data yang diperoleh merupakan hasil dari angket yang telah dibagikan kepada responden, yang kemudian responden akan menjawab pernyataan yang sudah tersusun secara sistematis dalam lembar kuesioner.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku referensi, jurnal penelitian, internet dan lain-lain.

3.4 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan dengan ditetapkan lokasi dalam penelitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6. Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2016:194) menyatakan bahwa “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam”.

3.6.2 Dokumentasi

Sugiyono (2018:240) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk dalam tulisan (catatan harian, peraturan kebijakan), gambar (foto, gambar, sketsa), atau karya monumental dari seseorang.

3.6.3 Observasi

Observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

3.7 Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian baik data primer maupun data sekunder, akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan mekanisme penulisan skripsi.

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian dan hubungannya terhadap keseluruhannya (*Spradley*).

3.7.1 Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melakukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalamannya data pada proses pengumpulan data berikutnya.

3.7.2 Reduksi Data

Yaitu sebagai suatu proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, informasi data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak penelitian memfokuskan wilayah penelitian.

3.7.3 Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca.

Hasil dan Pembahasan Penelitian Tentang Implementasi Program Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti menggunakan teori Pandangan Edwards III dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015 : 85) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu penulis akan membuat hasil penelitian serta pembahasan berdasarkan indikator penelitian tersebut.

Indikator Komunikasi

Dari hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan mengenai indikator komunikasi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai program kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh semua pihak, baik internal pegawai maupun masyarakat. Petugas dinilai memiliki sikap yang sangat baik, ramah, komunikatif, serta profesional dalam memberikan informasi dan melayani masyarakat. Mereka selalu siap membantu menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan yang dibutuhkan, sehingga masyarakat merasa nyaman dan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, pengelolaan dana untuk program kebersihan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan penggunaan anggaran yang dioptimalkan untuk pengadaan alat, operasional lapangan, pelatihan petugas, serta diaudit secara berkala untuk mencegah penyimpangan. Secara keseluruhan, komunikasi antara petugas dan masyarakat berjalan efektif dan mendukung keberhasilan pelaksanaan program kebersihan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Indikator Sumber Jaya

Dari hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan mengenai indikator sumber daya menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai dan berkompeten dalam menjalankan program kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Para informan menyatakan bahwa pelatihan dan pembinaan rutin diberikan untuk meningkatkan kapasitas petugas, meskipun masih ada kebutuhan untuk penambahan tenaga kerja terutama di wilayah dengan cakupan luas atau saat ada kegiatan besar. Dari segi peralatan, meskipun sudah tersedia berbagai alat kebersihan, armada pengangkut sampah, dan perlengkapan pelindung diri, masih terdapat kebutuhan untuk peremajaan dan penambahan alat agar efektivitas dan efisiensi kerja di lapangan dapat lebih optimal. Beberapa alat yang digunakan cenderung cepat rusak atau jumlahnya kurang memadai sehingga menghambat kelancaran tugas petugas. Mengenai anggaran, informan mengakui bahwa dana yang tersedia masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan operasional di lapangan, sehingga pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien dan prioritas diberikan pada kegiatan yang berdampak signifikan. Upaya pengajuan penambahan anggaran kepada pemerintah daerah terus dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kebersihan dan pengawasan lingkungan. Secara keseluruhan, meskipun sumber daya yang ada sudah menunjang pelaksanaan tugas, terdapat tantangan berupa keterbatasan jumlah tenaga kerja, peralatan yang perlu ditingkatkan, dan anggaran yang masih terbatas, sehingga perlu perhatian lebih agar program dapat berjalan dengan lebih optimal dan berkelanjutan.

Indikator Disposisi

Dari hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan mengenai indikator disposisi menunjukkan bahwa sikap, komitmen, dan tanggung jawab para pelaksana program kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik dan positif. Para pejabat struktural hingga petugas lapangan memperlihatkan kesungguhan dalam menjalankan tugas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Mereka menunjukkan kemauan untuk menerima dan melaksanakan kebijakan dengan sepenuh hati, serta berupaya mengatasi berbagai kendala yang ada di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran. Para petugas juga terlihat antusias dan memiliki rasa tanggung jawab tinggi terhadap tugas yang diemban, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, terdapat sikap terbuka untuk menerima masukan dan kritik dari masyarakat, yang menjadi



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

modal penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan ke depannya. Meskipun masih terdapat tantangan, seperti kebutuhan penambahan tenaga kerja dan peralatan, namun secara umum disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi sudah mendukung tercapainya tujuan program kebersihan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Indikator Laporan Rincian Anggaran

Dari hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan mengenai indikator struktur birokrasi menggambarkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi memiliki struktur organisasi yang jelas dan terorganisir dengan baik, yang mencakup pembagian tugas dan fungsi yang terdefinisi antara kepala dinas, kepala bidang, staf, dan petugas lapangan. Para informan menunjukkan bahwa koordinasi antar bagian dan jenjang jabatan berjalan efektif sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Struktur birokrasi ini memfasilitasi komunikasi yang baik antar unit kerja serta memastikan adanya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang transparan, terutama dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan tugas di lapangan. Meskipun demikian, terdapat tantangan terkait keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan yang terkadang mempengaruhi efektivitas kerja, namun struktur yang ada tetap menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, struktur birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi sudah mendukung pelaksanaan program secara sistematis dan profesional, dengan pembagian peran yang jelas dan mekanisme koordinasi yang berjalan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi program kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi tergolong cukup terimplementasi.

Saran

6.2.1 Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup bersama pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan.

6.2.2 Penguatan Pengawasan dan Penegakan Aturan

Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penerapan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.

6.2.3 Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur Kebersihan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Penambahan dan perbaikan fasilitas seperti tempat pembuangan sampah, armada pengangkut sampah, dan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan sangat diperlukan.

6.2.4 Kolaborasi Antar Stakeholder

Dinas Lingkungan Hidup harus menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta untuk mendukung program kebersihan secara berkelanjutan.

6.2.5 Pengembangan Program Berbasis Partisipasi Masyarakat

Mengembangkan program-program yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti bank sampah, komunitas peduli lingkungan, dan program penghargaan bagi lingkungan bersih, agar tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmosudiro, Prajudi, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Cepi, Triatna. 2016. *Perilaku Organisasi Dalam Pendidikan*. Rosda.

D, Mulyadi. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.

F, Daulay. *Dasar – dasar Manajemen Organisasi*. 2016. Vol 6. No 2.

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik (proses, analisis dan partisipasi)*. Bogor : Ghalia Indonesia.

J. P., Lester. & J Stewart. (2014). *Public Policy: An Evolving Approach*. Wadsworth.

M, Hill., & Hupe, P. (2022). *Implementasi Kebijakan Publik: Pengantar Studi Tata Kelola Operasional (edisi ke-4)*. SAGE Publications.

M, Howlett., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studi Kebijakan Publik: Siklus Kebijakan dan Subsistem Kebijakan (edisi ke-4)*. Oxford University Press.

M, Rachman. 2015. *5 Pendekatan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, PTK, R&D*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Nugroho, Riyan. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Purwanto, dan Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- R.E, Matland. (2020). *Mensintesis Literatur Implementasi: Model Ambiguitas-Konflik Implementasi Kebijakan. Dalam Kebijakan Publik: Teori, Konsep, dan Model (hlm. 145–164)*. Routledge.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research Dan Development*. Bandung : Alfabeta
- Syafiie, ddk. 2013. *Ilmu Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- S.C, Winter. (2020). *Perspektif Implementasi: Status dan Pertimbangan Ulang. Dalam The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration (hlm. 463–480)*. Oxford University Press.

B. Jurnal

- Ahmad, Ahmad, and Muslimah Muslimah. "Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif." *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*. Vol. 1. No. 1. 2021.
- Armstrong, Michael. (2014). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. Kogan Page.
- Data, Teknik Pengumpulan. "Observasi." *Wawancara, Angket Dan Tes* (2019).
- Hamda, Normina. "Masyarakat dan Sosialisasi." *Ittihad* 12.22 (2014): 107-115.
- Ismiyarto, Ismiyarto, and Honorata Ratnawati Dwi Putranti. "PERILAKU ORGANISASI (Organisasi Privat dan Organisasi Publik–Teori dan Aplikasinya)." *Yayasan DPI* (2023).
- Iskandar, Iskandar. "Dakwah pada Masyarakat Perkotaan." *Komunida* 5.1 (2015): 31-60.
- Muadi, Sholih, M. H. Ismail, and Ahmad Sofwani. "Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik." *JRP (Jurnal Review Politik)* 6.2 (2016): 195-224.
- NEGARA, BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI. "Ilmu administrasi negara." (2012).



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Sommaliagustina, Desi. "Implementasi otonomi daerah dan korupsi kepala daerah." *Journal of Governance Innovation* 1.1 (2019): 44-58.

C. Internet

Hamdi, Wibawa, Nugroho, Mulyd. 2014. Tentang Teori Implementasi Kebijakan. Diunduh 15 November 2024
https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/141801061_file%205.pdf

Ridwan HR. "Hukum administrasi Negara", (Jakarta: Rajawali Pers 2016, cet: XII), h.25. Diunduh pada 27 November 2024
<https://repository.uinbanten.ac.id/8340/5/BAB%20III.pdf>

Suparto. Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. (19) PROSIDING SEMNAS UMRAH (OTDA 2017). Diunduh pada 27 November 2024
<https://repository.uir.ac.id/841/1/%2819%29%20PROSIDING%20SEMNAS%20UMRAH%20%28OTDA%202017%29%20.pdf>

D. Undang-Undang

Undang Undang RI No. 4 tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.